

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
1. Manfaat Teoritis	18
2. Manfaat Praktis	18
E. Keaslian Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	28
A. Politik Hukum	28
B. Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam	35
1. Konsep Tentang Tindak Pidana dalam Hukum Pidana...	38
2. Konsep Tentang Sumber Daya Alam	54
C. Kejahatan Korporasi	61
D. Konsep Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	69
1. Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana...	69
2. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Delik	75
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	81
E. Stelsel Pidana Terhadap Korporasi	86
F. Landasan Teori	
1. Teori Sistem Hukum	
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	
3. Teori Pembaharuan Hukum Pidana	

BAB III	METODE PENELITIAN	151
A.	Jenis Penelitian	
B.	Data yang Dicari	
C.	Cara Mencari Data	
D.	Jalannya Penelitian	
E.	Analisis Data	
F.	Batasan Konsepsional	
	1 Politik Hukum	165
	2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	167
	3 Tindak Pidana di Bidang SDA	172
	4 Korporasi	176
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	189
A.	Pengaturan dalam Legislasi Mengenai Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang SDA di Indonesisa	189
	1. Ketidaksinkronan Nomenklatur Korporasi	190
	2. Ketidaksinkronan Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	198
	3. Ketidaksinkronan Penuntutan Terhadap Korporasi	251
	4. Ketidaksinkronan Kesengajaan dan Kealpaan Terhadap Korporasi	260
	5. Ketidaknsikronan Stelsel Sanksi Pidana Korporasi	281
	a. Ketidaksamaan Perumusan Sanksi Pidana	285
	1) Sistem Perumusan Tunggal	285
	2) Sistem Perumusan Alternatif	290
	3) Sistem Perumusan Kumulatif	294
	4) Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif	302
	b. Ketidaksamaan Berat Ringannya Sanksi	309
	c. Ketidaksamaan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi.....	316
	d. Ketidaksamaan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi	320

e.	Ketidaksamaan Pemberatan Pidana Terhadap Korporasi	323
f.	Ketidaksamaan Perumusan Kejahatan dan Pelanggaran	328
B.	Putusan Pengadilan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang SDA di Indonesia	339
1.	Putusan MA No. 2042 K/Pid.Sus/2015	340
2.	Putusan MA No. 862 K/Pid.Sus/2010	355
3.	Putusan MA No. 1554 K/Pid.Sus/2015.....	374
4.	Putusan No. 27/Pid.Sus/2015/PT PBR	395
5.	Putusan No. 284/Pid.B/2005/PN Manado	413
C.	Prospek Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang SDA di Indonesia	429
1.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Negara Lain...	434
a.	Amerika Serikat	436
b.	Inggris	446
c.	Australia	454
d.	Belanda	462
e.	Perancis	469
2.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perspektif PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi	478
3.	PERJA No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi	490
4.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perspektif RUU KUHP 2015	497
5.	Reformulasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang SDA di Indonesia	511
a)	Nomenklatur Korporasi	512
b)	Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana	519

c)	Pihak yang Dapat Dituntut Pidana	525
d)	Pembuktian Kesalahan Korporasi	530
e)	Stelsel Sanksi Pidana Terhadap Korporasi	544
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	570
A.	Kesimpulan	570
B.	Saran	573
DAFTAR PUSTAKA		575
INDEKS SUBJEK		602
INDEKS ISTILAH		606
GLOSARIUM		612
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		625
LAMPIRAN		
DAFTAR TABEL		
DAFTAR SINGKATAN		